

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran Ganjil Berasal dari Komponen Sementara

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa sejumlah anggaran ganjil dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 merupakan komponen sementara dalam sistem penganggaran elektronik.

Mata anggaran ganjil, seperti pembelian lem Aica-Aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pulpen sebesar Rp 123,8 miliar, disebut sebagai mata anggaran sementara yang akan diperbaiki dalam pembahasan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan, komponen-komponen ganjil tersebut merupakan komponen sementara yang diisikan karena sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*) membutuhkan isian komponen untuk memunculkan anggaran.

"Saat ini proses rancangan KUA-PPAS belum sampai input komponen. Tetapi, supaya dalam prosesnya tidak mengalami hambatan, dari sekarang sudah dicicil komponennya. Namun, beberapa teman SKPD (satuan kerja perangkat daerah) mengisi komponennya tidak sesuai. Dampaknya, ketika mengisi komponen yang tidak sesuai, teman-teman seolah-olah menemukan suatu hal yang agak aneh, itu kami sadari," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Saat kolom komponen tidak diisi, kata Mahendra, pagu kegiatan itu tidak akan muncul. Nantinya, komponen itu akan dibahas dan dirinci dalam pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD DKI menjadi mata anggaran yang tepat sesuai dengan kegiatan. Dengan pengalaman sebelumnya, perkiraan awal biaya dimasukkan, tetapi beberapa dengan nama komponen yang belum sesuai.

Saat ini, kata Mahendra, rancangan KUA-PPAS dalam proses penyisiran dan penajaman.

### Sisir anggaran

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Edy Junaedi menjelaskan, detail komponen mata anggaran *influencer* senilai Rp 5 miliar untuk lima orang sebenarnya merupakan kegiatan promosi kegiatan pariwisata. Di dalamnya ada belanja media, dukungan *supporting event*, dan komponen lain. Ia mengakui, secara teknis ada kekeliruan dalam memasukkan komponen. "Ibaratnya, isinya sudah benar, tetapi *cover-nya ter-publish* seperti itu dan dibaca teman-teman media tidak efisien."

Menurut Edy, mata anggaran itu sudah dihapus awal Oktober sebagai tindak lanjut arahan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk efisiensi anggaran dan lebih melibatkan masyarakat dalam berkolaborasi dengan program Pemprov DKI.

Akan tetapi, karena revisi penginputan harus menunggu pembahasan, penghapusan baru bisa dilakukan secara internal dan belum bisa dimasukkan ke sistem.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, mata anggaran lem Aica-Aibon Rp 82,8 miliar merupakan komponen dari anggaran alat tulis kantor dari pos belanja operasional pendidikan. Penyusunan anggarannya adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Tujuan anggaran ini buat membiayai operasional pendidikan semua SD di Jakarta Barat yang totalnya 209 sekolah.

Anggaran disusun berdasarkan jumlah murid, yakni Rp 150.000 per siswa tiap bulan sehingga diperoleh pagu total sekitar Rp 182 miliar per tahun. Dalam penyusunan anggaran, suku dinas dituntut memasukkan komponen yang akan dibahas selanjutnya sehingga diisi komponen sementara.

"Kegiatan yang dibutuhkan betul-betul akan dilakukan se-yogianya menunggu komponen atau uraian kegiatan yang disusun setiap sekolah. Karena

uraian kegiatan komponen belum tersedia di semua sekolah, masih dalam proses, teman-teman suku dinas menginput komponen sementara yang akan digantikan dengan komponen-komponen yang diinput oleh suku dinas," katanya.

Anggaran lem Aica-Aibon direvisi jadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di semua sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Syaefuloh menampik anggapan bahwa pihaknya tidak teliti mengisi komponen *e-budgeting*.

Dia menjelaskan, proses penyusunan anggaran dilakukan pertama kali oleh setiap SKPD, termasuk suku dinas. Itu dilakukan sejak April lalu. Bersamaan dengan itu, proses penyusunan anggaran juga terjadi di setiap sekolah yang nanti akan disandingkan dengan penyusunan anggaran SKPD.

"Hanya saja, untuk sekolah, karena melibatkan 2.100 sekolah, tentu tak akan secepat menyusun anggaran seperti yang dilakukan sudin. Jadi, bukan salah input, melainkan memang yang ada di dalam komponen *e-budgeting* adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari setiap sekolah," tutur Syaefuloh.

Anggaran pengadaan pulpen senilai Rp 123,8 miliar juga akan direvisi sesuai kebutuhan. Kebutuhan itu dilihat berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam Rancangan KUA-PPAS 2020, anggaran pengadaan pulpen diperuntukkan bagi 98.000 pegawai. Jenis pulpen yang digunakan adalah *pen drawing*. Dalam data itu, tertulis, pegawai mendapatkan satu pulpen dengan harga satuan Rp 105.000 setiap bulan selama setahun.

Menurut Syaefuloh, atas arahan Gubernur yang meminta seluruh anggaran di SKPD dipastikan sesuai kenyataan, pihaknya menginstruksikan penyusunan kembali anggaran di suku dinas secara akuntabel, transparan, dan ekonomis.

### Transparansi

Selain mata anggaran ganjil, kritik terhadap pembahasan anggaran DKI 2020 adalah tidak adanya transparansi. Salah satunya karena hingga Oktober ini rincian anggaran tidak diunggah di [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana, mengatakan, anggota DPRD baru mendapatkan rincian tepat pada awal rapat komisi. Akibatnya, mereka tak mempunyai waktu meneliti dan menganalisis anggaran yang diajukan pemprov.

"Padahal, kami sudah bersurat agar rincian ini diunggah sejak Agustus sehingga masyarakat bisa terlibat menelitinya. Sampai sekarang kami saja belum terima rincian, baru gambaran besarnya," katanya.

Rincian anggaran pernah diunggah dan bisa dilihat secara terbuka dalam waktu yang sangat singkat saja. Setelahnya, halaman tak bisa diakses.

Terkait dengan hal ini, Mahendra mengatakan, sesuai aturan, rancangan KUA-PPAS belum diunggah untuk publik. Hal ini juga berlaku tahun-tahun sebelumnya. Anggaran baru diunggah saat menjadi KUA-PPAS yang disepakati bersama DPRD DKI Jakarta.

Akan tetapi, tahun ini rancangan yang diajukan sejak Juli itu belum selesai dibahas hingga Oktober karena menunggu tuntasnya proses transisi kepemimpinan DPRD DKI. Ia menjanjikan anggaran diunggah saat pembahasan dengan DPRD DKI tuntas dan rancangan KUA-PPAS disahkan menjadi KUA-PPAS.

Untuk anggaran yang sempat terunggah dengan beberapa komponen yang ganjil, kata Mahendra, kemungkinan ada kesalahan sistem karena pihaknya belum pernah mengunggah apa pun terkait anggaran 2020.

(IRE/BOW)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Anggaran Ganjil Berasal dari Komponen Sementara

## Sejumlah Anggaran dalam Rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 Diduga Bermasalah (miliar rupiah)

**Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakbar**  
 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri  
 • Lem Aica-Aibon x 37.500 orang x 12 bulan  
**82,8**

**Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik**  
 Pengembangan Infrastruktur Jakarta Smart City  
 • Smart Storage x 4 unit  
**53**

• Storage Server x 10 unit  
**12,9**

Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi Komunikasi Publik  
 • Penayangan Talkshow x 9 kali  
**6,8**

**Dinas Pendidikan**  
 Pengadaan Peralatan Kompetensi Keahlian Unit Sekolah Baru SMK Negeri  
 • Komputer x 7.313 unit  
**132**

**Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jaktim**  
 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri  
 • Ballpoint x 98.322 x 12 bulan  
**123,8**

**Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**  
 Pengadaan Peralatan Kerja  
 • Server Hyperconvergence x 5 set  
**24,2**

### Ringkasan Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun 2018 dan 2019 (miliar rupiah)

Kategori	2018	2019
Pendapatan	65.810	74.997
Belanja	75.094	77.858
Defisit	9.284	2.860
Penerimaan pembiayaan	17.452	11.895
Pengeluaran pembiayaan	8.168	9.035

**KUA-PPAS:**  
 Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Sumber: Laman Resmi apbd.jakarta.go.id dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi PSI, diolah oleh Litbang Kompas/ERN/XNA/PUT

INFOGRAFIK: DIMAS